

**PENERAPAN PASAL 2 AYAT (1) DAN (2) PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS  
PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH  
WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU  
BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA *ONLINE*  
(Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam  
Ilmu Hukum

**Oleh:**

**VIRANA NABIELA  
NIM.135010100111084**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2017**

## HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi** : **PENERAPAN PASAL 2 AYAT (1) DAN (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA *ONLINE* (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang).**

### **Identitas Penulis**

**a. Nama** : **VIRANA NABIELA**  
**b. NIM** : **135010100111084**  
**Konsentrasi** : **Hukum Administrasi Negara**  
**Jangka Waktu penelitian** : **6 Bulan**

Disetujui pada tanggal  
Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Iwan Permadi, S.H., M.Hum.  
NIP. 197201172002121002

Dr. Shinta Hadiyantina, SH.,M.H  
NIP. 197703052009122001

Mengetahui,  
Ketua Bagian  
Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi, S.H., MHum.  
NIP. 196008101986011002

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENERAPAN PASAL 2 AYAT (1) DAN (2) PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DARI  
USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG  
MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU BAGI WAJIB PAJAK  
ORANG PRIBADI PENGUSAHA *ONLINE*  
(Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang).**

**Oleh :  
Virana Nabiela  
135010100111084**

Skripsi ini Telah Disahkan Oleh Majelis Penguji Pada Tanggal :

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**

Dr. Iwan Permadi, S.H., M.Hum.  
NIP. 197201172002121002

Dr. Shinta Hadiyantina, SH.,M.H  
NIP. 197703052009122001

**Mengetahui,**

**Ketua Bagian  
Hukum Administrasi Negara**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Brawijaya**

Lutfi Effendi, S.H., MHum.  
NIP. 196008101986011002

Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si.  
NIP. 196208051988021001

## KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur mendalam penulis panjatkan pada Allah SWT atas berkah serta karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “PENERAPAN PASAL 2 AYAT (1) DAN (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA *ONLINE* (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang)”. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Penulis juga mengucapkan rasa terimakasih atas semua bantuan yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan tugas akhir ini hingga selesai. Secara khusus rasa terimakasih tersebut penulis sampaikan kepada:

1. Keluarga tercinta, Ayah Ibu dan Adik tersayang atas kasih sayang, doa dan dukungan yang tiada henti, khususnya selama penulis menyelesaikan kuliah.
2. Bapak Dr. Rachmad Syafa'at, S.H. M.Si. selaku Dekan dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Lutfi Effendi, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
4. Bapak Dr. Iwan Permadi, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan dan motivasi dalam penyusunan tugas akhir ini.
5. Ibu Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., MH selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan dan motivasi dalam penyusunan tugas akhir ini.
6. Bapak Rudy Gunawan selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk dapat melakukan survey penelitian, dan Bapak Edi Suprianto selaku Pelaksana

Seksi Ekstensifikasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang yang telah menyempatkan diri untuk meluangkan waktunya dalam memberikan semua informasi dan bantuannya selama melakukan penelitian ini.

7. Serta orang paling spesial, teman teman yang sangat saya sayangi dan banyak pendukung lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan tugas akhir ini.

Terakhir penulis berharap, semoga tugas akhir ini dapat memberikan hal yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca dan khususnya bagi penulis juga.

Malang, November 2017

Penulis,

Virana Nabiela

## DAFTAR ISI

### Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>	<b><u>i</u></b>
HALAMAN PENGESAHAN.....		ii
KATA PENGANTAR.....		ii
DAFTAR ISI.....		v
DAFTAR		
TABEL.....		vii
DAFTAR GAMBAR.....		viii
RINGKASAN.....		ix
SUMMARY.....		x
BAB I PENDAHULUAN.....		1
A. Latar Belakang.....		1
B. Rumusan Masalah.....		12
C. Tujuan Penelitian.....		12
D. Manfaat Penelitian.....		13
E. Sistematika Penulisan.....		14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....		17
A. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha.....		17
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pajak.....		26
C. Tinjauan Umum Mengenai Pph.....		31
D. Teori Keadilan.....		50
BAB III METODE PENELITIAN.....		53
A. Jenis Penelitian.....		53
B. Pendekatan Penelitian.....		54
C. Lokasi Penelitian dan Alasan Pemilihan Lokasi.....		55
D. Jenis dan Sumber Data.....		56
E. Teknik Memperoleh Data.....		57
F. Populasi,Sampel, dan Teknik Sampling.....		57
G. Teknik Analisis Data.....		59
H. Definisi Operasional.....		59
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		61
A. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang.....		61
B. Penerapan pengenaan PPh bagi pelaku usaha <i>online</i> berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha <i>Online</i> .....		68

C.    Hambatan dan upaya yang dilakukan KPP Pratama Malang dalam menangani wajib pajak pelaku usaha <i>online</i> agar bersedia membayar pajak sama seperti pelaku usaha toko fisik .....	82
BAB V PENUTUP.....	87
A.    Kesimpulan.....	87
B.    Saran .....	88
DAFTAR PUSTAKA .....	90

## **DAFTAR TABEL**

Tabel. 1 Penelitian Terdahulu .....	10
Tabel. 2 Jumlah Wajib Pajak KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha) “Perdagangan Eceran Melalui Media” .....	72
Tabel. 3 Jumlah Penerimaan PPh Final Orang Pribadi Sesuai dengan PP 46 Tahun 2013 KPP Pratama Malang atas KLU “Perdagangan Eceran Melalui Media” .....	77
Tabel. 4 Jumlah Total Penerimaan PPh Final Orang Pribadi Sesuai dengan PP 46 Tahun 2013 KPP Pratama Malang.....	81



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Simulasi Pengisian SSP.....	45
--------------------------------------	----

## RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan PPh bagi pelaku usaha *online* telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha *Online*. Dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah tersebut telah dijelaskan bahwa dalam beberapa artikel dari dirjen pajak sendiri menyebutkan bahwa pengusaha *online* dapat dikategorikan sebagai pengusaha tertentu yang diwajibkan melaporkan penghasilannya dan membayar pajaknya. Tetapi berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa onlineshop seperti @kemejapantai @herfragrance.id @hippiyippy mereka tidak melaporkan pajaknya. Bahkan masih banyak dari mereka yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sehingga mereka tidak membayarkan pajak penghasilan dari hasil online shop di akun instagram yang mereka miliki. Permasalahan diatas jelas menunjukkan ketidakadilan terhadap usaha onlineshop di akun instagram yang belum memiliki NPWP sehingga mereka tidak membayarkan Pph dari hasil usahanya. Adapun jenis penelitian ini adalah Yuridis Empiris dengan metode penelitian Yuridis Sosiologis yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lapangan untuk dapat menjawab permasalahan yang ada yakni terkait Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usahanya dengan melalui media internet dalam melakukan pembayaran pajak. Dari hasil informasi yang diperoleh penulis di lapangan maka diperoleh kesimpulan bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha online telah diterapkan oleh KPP Pratama Malang kepada Wajib Pajak Pengusaha Online, namun di dalam penerapannya masih belum sesuai dikarenakan berbagai faktor diantaranya adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak pengusaha online dalam melakukan sistem pajak self assessment.

## SUMMARY

This study aims to determine concluded that between 2 (1) and (2) Permanent Government Regulation Number 46 of 2013. Personal Reporter in Online shop. In 2nd (1) and 2 (2) of the Government Regulation it has been explained that in some articles of the director general of his own name he calls the online manager in a certain predictor who is responsible for the altering and deciding of the player. But based on the results of interviews conducted by the authors of some onlineshop such as @kemejahpah @herfragrance.id @hippiyippy they did not barked. Even if they do not have their Owner's Registration Number (NPWP) so they do not want the downloaders of the online shop at the installs that they own. If in the future it shows no interest to any onlineshop in the instance that does not have a NPWP so they do not make Pph by default. As for this type of research is Juridical Empirical with research methods Sociological Juridical done by doing research in the field to be able to answer the existing problems that is related to the Wily of the Ruler yang melarnya his own with the adanya menajni media internet in bali pembesarier. From the information obtained by the authors in the field, it can be concluded that between 2 (1) and (2) Permanent Government Regulation Number 46 of 2013 is for taxpayers of private entrepreneurs online has been applied by KPP Pratama Malang to the Online Taxpayer, but inside the application is still not appropriate dikedrennk various factors including the level of compliance online business taxpayer in conducting self-sessions system self.